

Pencapaian *Inclusive Development* pada Pengembangan Pariwisata di Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi

Sulikh Asmorowati
Mia Fairuza
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga Surabaya
email: sasmorowati@gmail.com; miafairuza@gmail.com

Abstrak

Pembangunan dan pengembangan pariwisata di pantai Pulau Merah Banyuwangi telah menghasilkan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar pantai. Artikel ini membahas tentang hasil pembangunan dan pengembangan pantai Pulau Merah dengan menggunakan paradigma pembangunan inklusif, yaitu aspek manfaat, partisipasi, dan ekologi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap 27 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan pariwisata di Pulau Merah, khususnya pencapaian pembangunan inklusif di Pulau Merah sudah baik. Hal ini karena dalam ketiga aspek pembangunan inklusif, yaitu aspek manfaat, partisipasi, dan ekologi sudah terlaksana dengan baik. Manfaat pembangunan dan pengembangan Pulau Merah telah dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar pantai Pulau Merah. Partisipasi masyarakat pada pembangunan dan pengembangan pantai Pulau Merah termasuk cukup tinggi. Begitu halnya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekologi di pantai Pulau Merah juga termasuk tinggi.

Kata Kunci: Pembangunan pariwisata, pembangunan inklusif, partisipasi, pemberdayaan

ACHIEVEMENT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN TOURISM DEVELOPMENT IN PULAU MERAH OF BANYUWANGI REGENCY

Abstract

The development of tourism on the coast of Pulau Merah Banyuwangi has resulted in the welfare felt directly by the people around the coast. This article discussed the results of development of the Pulau Merah coast by using the inclusive development paradigm, they are consists of benefits, participation, and ecology aspects. This qualitative research has used a case study approach. Data collection was conducted through interviews of 27 informants. The results of this study indicated that in the development of tourism in Pulau Merah, especially the achievement of inclusive development was good. This is caused in three aspects of inclusive development; the aspects of benefits, participation, and ecology are well implemented. The benefits of the development of Pulau Merah have been felt evenly by the people. Community participation of Pulau Merah coast is quite high. The public awareness of the importance of ecology on the coast of Pulau Merah is also high.

Keywords: tourism development, inclusive development, participation, empowerment

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan dalam segala aspek kehidupan yang direncanakan secara sistematis dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Istilah pembangunan pertama kali dicetuskan pada saat pasca Perang Dunia II oleh Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat ke-33). Konsepsi pembangunan pada awalnya diciptakan untuk mengatasi keterbelakangan dari sudut pandang negara maju yang kemudian secara bertahap berkembang menjadi semakin universal (Hettne dalam Amien 2005).

Konsep pembangunan terus berkembang sejak akhir perang dunia II. Teori pembangunan yang pertama kali muncul adalah teori modernisasi yang mencakup teori-teori mikro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses pembangunan (Badrudin, 2009). Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Teori ini cenderung menggunakan pengukuran ekonomi dalam pembangunan seperti pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. Teori modernisasi meyakini bahwa dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup juga tinggi.

Sejak saat itu perkembangan paradigma pembangunan semakin meluas yang ditandai dengan mulai munculnya pembangunan alternatif yang memiliki sudut pandang dari berbagai aspek seperti pembangunan berkelanjutan yang kemudian memunculkan alternatif pembangunan lain seperti *green economy* dan *green growth* yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam batas lingkungan. Konsep-konsep tersebut sesuai dengan teori ekologi modernisasi yang berdasarkan pendekatan neo-liberal dimana komponen sosial masih terabaikan. Lalu untuk menyempurnakan konsep pembangunan, muncul pembangunan inklusif sebagai komponen sosial dari pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan inklusif mendorong semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan. Kelompok masyarakat yang inklusif harus dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Pembangunan inklusif pun menjadi agenda pembangunan utama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Untuk menggenjot perekonomian negara, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Indonesia yang memberikan kontribusi yang besar adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan. Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dinilai cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2011	7.649.731
2012	8.044.462
2013	8.802.129

2014	9.435.411
2015	10.230.775

Sumber: www.bps.go.id (diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 20.43 WIB)

Pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja sektor pariwisata. Pemerintah menargetkan bisa mendatangkan wisman hingga 20 juta orang pada 2019. Untuk meningkatkan kunjungan wisman, Kementerian Pariwisata meningkatkan dana promosi dari sebelumnya Rp 300 miliar menjadi Rp 1 triliun pada tahun 2015, (www.beritasatu.com diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 13.27 WIB) dan bisa mencapai Rp 6 triliun pada 2016 (industri.bisnis.com diakses pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 00.54 WIB). Dengan dana tersebut, pemerintah berharap bisa membantu promosi pariwisata daerah yang dirasa masih sangat kurang. Menurut World Economic Forum (WEF) yang merilis *The Travel and Tourism Competitiveness Index*, Indonesia mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, ranking daya saing Indonesia berada di urutan ke-74 dan pada tahun 2013 naik ke posisi 70 di antara negara-negara di dunia. Sedangkan pada tahun 2015, ranking daya saing Indonesia mengalami peningkatan yang pesat yakni berada pada peringkat 50 dari 141 negara dengan nilai indeks 4,04. Artinya, dalam dua tahun terakhir terdapat perbaikan signifikan pada bidang-bidang yang mendukung pariwisata di negara ini (www.marketeers.com diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 12.56 WIB).

Sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap devisa negara, menyaingi gas dan minyak bumi. Keberhasilan pariwisata di Indonesia tidak luput dari peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan di sektor pariwisata. Keseimbangan dan keselarasan peran *stakeholder* dalam pembangunan pariwisata merupakan kunci utama keberhasilan sektor pariwisata (Demartoto, 2009:20).

Seiring dengan semakin berkembangnya pendekatan pembangunan inklusif, pembangunan sektor pariwisata di Indonesia saat ini juga telah menggunakan pendekatan kepariwisataan inklusif. Hal itu dituangkan dalam sasaran pembangunan pariwisata tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Tujuan dari sasaran pembangunan pariwisata inklusif yakni meningkatkan usaha lokal dalam perindustrian pariwisata dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal. Kepariwisataan inklusif diyakini dapat mengurangi kemiskinan dan diskriminasi gender dalam keterlibatan proses pembangunan di sektor pariwisata.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang saat ini terkenal dengan destinasi ekowisatanya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung timur pulau Jawa, sehingga Banyuwangi memiliki julukan yaitu "*Sunrise of Java*". Selain itu, letak kabupaten Banyuwangi yang berdekatan dengan Pulau Bali juga merupakan salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisata di Banyuwangi. Hal itu disebabkan karena tidak sedikit wisatawan pengguna jalur darat yang meluangkan waktu untuk singgah di kabupaten Banyuwangi. Munculnya objek-objek pariwisata baru dan keberhasilan kebijakan pembangunan sektor pariwisata menjadikan Banyuwangi sebagai daerah yang mendunia dalam sektor pariwisata. Hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan kabupaten Banyuwangi pada ajang *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*

Awards for Excellence and Innovation in Tourism ke-11, sebagai juara satu kategori Inovasi Kebijakan Publik. Saat ini kabupaten Banyuwangi tidak hanya dijadikan tempat singgah wisatawan yang akan menuju ke Bali, akan tetapi kabupaten Banyuwangi sudah menjadi daerah tujuan wisata.

Pengembangan pariwisata di Banyuwangi dipayungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi. Poin konsideran dalam UU tersebut menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (Irawan, 2015).

Dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata Banyuwangi yang dilakukan membuahkan hasil. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di Banyuwangi. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 97 persen dari 14.021 wisatawan pada 2013 menjadi 27.698 pada 2014, sedangkan wisatawan domestik tumbuh 66 persen dari 901.759 pada 2013 menjadi 1.500.735 wisatawan pada 2014 (data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, 2015). Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Banyuwangi

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2012	660.831	8.690
2013	901.759	14.012
2014	1.500.735	27.689
Rata-Rata Pertumbuhan (%)	51,43	79,42

Sumber: Disbudpar (2015)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan setiap tahun sejak 2012 untuk wisatawan domestik mencapai 51,43 persen dan wisatawan mancanegara 79,42 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi. Data menunjukkan pada tahun 2014, kunjungan wisatawan ke Pulau Merah sekitar 106.901 orang dan pada tahun 2015 mencapai 338.978 orang serta 290.447 orang pada tahun 2016 (data Manajemen Wisata Pulau Merah). Selain itu, pendapatan wisata Pulau Merah dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015, pendapatan wisata Pulau Merah mencapai Rp 776,4 juta, pada tahun 2015 mencapai Rp 2,44 milyar, dan pada tahun 2016 mencapai 2,47 milyar

Salah satu objek wisata di Banyuwangi yang dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat adalah Pantai Pulau Merah atau *Red Island*. Berikut tabel dan grafik kunjungan wisatawan dan pendapatan di Pulau Merah:

Tabel I.3
Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan di Pulau Merah Tahun 2014-2016

Bulan	2014		2015		2016	
	Jumlah Pengunjung	Rupiah (000)	Jumlah Pengunjung	Rupiah (000)	Jumlah Pengunjung	Rupiah
Januari	-	-	20.390	118.497	18.050	110.509
Februari	-	-	20.774	128.130	20.082	121.998
Maret	-	-	20.696	130.260	20.655	126.400

April	-	-	15.904	95.942	15.476	127.811
Mei	-	-	26.295	162.819	31.241	283.386
Juni	-	-	17.219	101.758	8.195	75.520
Juli	-	-	64.321	557.996	68.322	629.556
Agustus	-	-	20.935	134.826	15.352	139.146
September	-	-	19.615	141.343	17.430	160.467
Oktober	15.822	94.475	16.853	108.820	16.426	154.252
November	19.478	129.934	20.094	124.346	15.959	148.323
Desember	71.601	552.023	75.882	633.196	43.259	392.246
Total	106.901	776.432	338.978	2.437.933	290.447	2.469.614

Sumber: Dokumen Kesatuan Bisnis Mandiri

Semenjak bupati Abdullah Azwar Annas menjabat pada tahun 2010, beliau membuat gebrakan baru di bidang pariwisata seperti meresmikan tiga destinasi pariwisata unggulan yang salah satunya adalah Pulau Merah atau *Red Island*. Adapun dua destinasi lainnya yaitu Kawah Ijen dan *G-Land*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah kepemimpinan Azwar Annas memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan pariwisata di Pulau Merah atau *Red Island*, salah satunya dengan memperbaiki akses jalan menuju lokasi. Pemkab Banyuwangi telah memperkenalkan Pantai Pulau Merah ke dunia internasional melalui penyelenggaraan ajang lomba balap sepeda "*Banyuwangi Tour de Ijen*" pada akhir tahun 2012 (www.id.wikipedia.org diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 14.50 WIB).

Keindahan pantai dan ombak yang cukup tinggi menjadikan Pulau Merah atau *Red Island* sebagai pilihan tempat diselenggarakannya *Internasional Surfing Competition* setiap tahun secara rutin sejak tahun 2013 oleh pemerintah daerah. Pada *International Surfing Competition* yang terakhir kali dilaksanakan yakni pada September 2015 terdapat dua puluh negara yang mengikuti lomba ini. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pembangunan sektor pariwisata.

Selain itu, untuk lebih mengembangkan wisata pantai Pulau Merah atau *Red Island*, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melibatkan *stakeholder* lainnya yakni masyarakat setempat dan para pengusaha. Salah satu yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan melibatkan serta mengembangkan sektor UMKM. Hal tersebut dilakukan untuk menyalurkan semangat pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Partisipasi masyarakat sekitar dalam pembangunan pariwisata di Pulau Merah sangat baik, hal ini terlihat dari adanya pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) Pulau Merah yang aktif mengelola pariwisata Pulau Merah dengan menjunjung tinggi aspek keterbukaan pertanggungjawaban demi kemajuan wisata Pulau Merah. Selain itu, masyarakat sekitar Pulau Merah mulai banyak memperbaiki perekonomiannya dengan mendirikan usaha di wisata Pulau Merah, salah satunya adalah pendirian penginapan (*homestay*) oleh masyarakat yang rumahnya dekat dengan Pulau Merah. Jumlah *homestay* ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel I.2
Jumlah Homestay di Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Homestay Pulau Merah	7	10	15	27

Sumber: www.banyuwangikab.go.id (diakses pada tanggal 23 Juni 2016 pukul 22.47 WIB)

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Avriatama (2016) tentang “Dampak Pengembangan Wisata terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pelaku Usaha di sekitar Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi” menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat sekitar Pulau Merah meningkat hingga dua kali lipat sejak dikembangkannya objek wisata Pulau Merah. Perkembangan dan pembangunan pariwisata yang sangat pesat ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pendekatan terbaru dalam pembangunan, yaitu pendekatan pembangunan inklusif. Lebih spesifiknya, penelitian ini membahas tentang pencapaian pembangunan inklusif pada pengembangan pariwisata di Pulau Merah.

Definisi Pembangunan Inklusif

Inklusif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) secara harfiah diartikan sebagai “yang termasuk”. Artinya, pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat. Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang secara singkat mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang melibatkan dan mengikutsertakan seluruh warga negara. Lebih singkatnya, pembangunan inklusif juga dapat disebut “pembangunan untuk semua”. Pembangunan bukan hanya untuk mereka yang pandai, kaya, sehat, dan bekemampuan lebih baik atau berkedudukan tinggi saja, tetapi mereka yang kurang beruntung dan kurang diperhatikan memiliki hak untuk menikmati manfaat pembangunan.

The International Policy for Inclusive Growth (IPC) memandang pembangunan inklusif sebagai hasil dan proses, yakni memastikan bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam proses pertumbuhan (pengambilan keputusan) dan memastikan semua orang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut secara adil dan merata (Perch dan Labbate, 2011). Definisi tersebut seragam dengan argumen yang dikemukakan oleh Rauniyar & Kanbur (2010) bahwa pembangunan inklusif membahas tentang distribusi kesejahteraan dimana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Sach (2004: 36) mengemukakan bahwa pembangunan inklusif sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak sipil. Hak-hak sipil yang dimaksud oleh Sachs yakni kepemilikan akses yang sama oleh semua masyarakat dalam pelayanan publik.

Menurut Oxfam, organisasi pembangunan dunia yang memobilisasi kekuatan masyarakat dalam memerangi kemiskinan, pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yang mempunyai nilai-nilai yang sama dan mensinergikan kontribusi dari semua *stakeholders* termasuk kelompok yang terpinggirkan dalam mengatasi isu-isu pembangunan. Oxfam menyatakan bahwa pembangunan inklusif dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan hasil pembangunan melalui kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta (www.oxfam.org diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 01.46 WIB). Pendapat lain dikemukakan oleh Cozzens &

Sutzh (2012) yang memandang pembangunan inklusif sebagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang terpinggirkan, yakni sebagai berikut:

“Inclusive development as encompassing actions that are both by and for currently marginalized group” (pembangunan inklusif mencakup tindakan baik yang dilakukan oleh dan untuk kelompok yang terpinggirkan saat ini).

Pendapat tersebut senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Gupta et al. (2015) yang mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai:

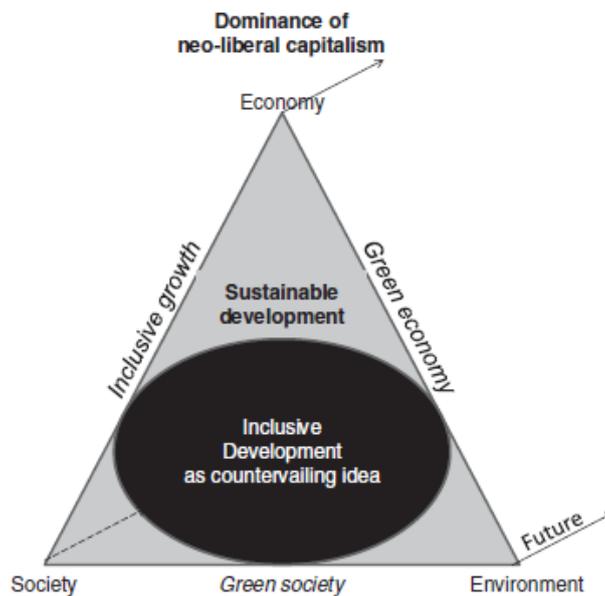
“We define inclusive development as development that includes marginalized people, sectors and countries in social, political and economic processes for increased human well-being, social and environmental sustainability, and empowerment.”

Berdasarkan definisi Gupta et al. (2015), pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang meliputi partisipasi masyarakat marjinal, sektor pemerintahan, sektor politik, dan sektor ekonomi yang saling berkaitan dalam proses sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung sumber daya yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Gupta et al. (2015) berpendapat bahwa terdapat enam alasan mengapa pembangunan inklusif dianggap tepat, yakni (a) pertimbangan normatif, mengkhawatirkan orang miskin menjadi termarginalkan dalam kehidupan bermasyarakat; (b) alasan hukum, yakni hak asasi manusia; (c) alasan ekonomi, memastikan produksi ekonomi oleh generasi mendatang dan untuk memperkuat badan ekonomi berbasis masyarakat; (d) alasan keamanan, yakni orang miskin memiliki akses hukum sehingga hidup dalam keselamatan; (e) alasan demokrasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan serta pembagian sumber daya dan kesejahteraan; (f) argumen relasional, yakni melihat kemiskinan sebagai akibat dari tindakan orang lain. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan inklusif adalah konsep pembangunan yang menekankan aspek sosial dengan mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil, menghilangkan eksklusifitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang terpinggirkan (marjinal).

Posisi Pembangunan Inklusif

Fokus utama pembangunan inklusif awalnya hanya pada aspek-aspek sosial yang kemudian diperluas lagi menjadi aspek sosial dan lingkungan. Hal itu karena beberapa peneliti pembangunan seperti Zoomers (2010), Fairhead et al. (2012), dan Leach et al. (2012) berpendapat bahwa pembangunan inklusif memiliki komponen ekologi yang kuat seperti masyarakat termiskin yang seringkali bergantung pada sumber daya lokal dan rentan terhadap tanah, air, dan ikan (dalam Gupta et al. 2015). Namun, resesi global telah diperburuk oleh *trend* politik dalam mengadopsi *trade-off* yang lebih berfokus pada pertumbuhan dan pekerjaan daripada lingkungan dan inklusif. Hal tersebut menjadi penyebab munculnya konsep *green economy* dan *green growth* yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam batas lingkungan. Konsep-konsep ini sesuai dengan teori ekologi modernisasi yang berdasarkan pendekataan neo-liberal dimana mengabaikan komponen sosial dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan inklusif merupakan aspek sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan (Gupta et al, 2015).

Gambar I.1
Posisi Pembangunan Inklusif



Sumber: Gupta et al. (2015)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti menggambarkan data dan informasi termasuk yang berupa tindakan dan perilaku yang diamati, untuk dianalisis secara kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan di Pulau Merah, dengan melibatkan beberapa *stakeholders*, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, staf dan pimpinan Kecamatan Pesanggaran dan Desa Sumberagung, Perum Perhutani, serta dari pihak *civil society* yang meliputi Kesatuan Bisnis Mandiri, dan kelompok masyarakat yaitu pokdarwis (kelompok sadar wisata) Pulau Merah dan masyarakat umum yang mempunyai perhatian dengan pengembangan wisata di Pulau Merah. Informan dipilih dengan menggunakan 'purposive or theory sampling' (Padgett 1998: 51), yaitu berdasarkan pemahaman informan terhadap topik penelitian. Hingga akhir penelitian, total 27 informan telah memberikan data yang kaya dan mendalam tentang pencapaian pembangunan inklusif di Pulau Merah. Wawancara dilakukan antara 1-2 jam, di man peneliti mencatat sekaligus merekam hasil wawancara dengan ijin subyek penelitian. Selain mengumpulkan data primer, data sekunder dikumpulkan dengan menganalisis beberapa dokumen, laporan atau berita yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melibatkan reduksi data, yaitu membuang data-data yang tidak atau kurang relevan. Peneliti kemudian membuat interpretasi dengan memberi makna pada tema dan sub tema, mempresentasikan dalam diskusi dan pembahasan dan terakhir, menyimpulkan.

Triangulasi sumber data digunakan untuk mengecek validitas data. Hal ini dilakukan dengan mengecek data yang bersumber dari wawancara dengan data yang dikumpulkan dari pengamatan dan analisis dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Pencapaian Pembangunan Inklusif pada Pengembangan Pariwisata di Pulau Merah

Pada dasarnya, pembangunan inklusif harus selalu diikuti dengan manfaat yang merata serta partisipasi masyarakat tinggi. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh *The International Policy for Inclusive Growth (IPC)* yang memandang pembangunan inklusif sebagai hasil dan proses, yakni memastikan bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam proses pertumbuhan (pengambilan keputusan) dan memastikan semua orang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut secara adil dan merata.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis pencapaian pembangunan inklusif melalui tiga komponen, yakni manfaat, partisipasi, dan ekologi. Peneliti memilih ekologi didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa peneliti pembangunan seperti Zoomers (2010), Fairhead et al. (2012), dan Leach et al. (2012) yang berpendapat bahwa pembangunan inklusif memiliki komponen ekologi yang kuat (dalam Gupta et al., 2015). Hal itu disebabkan pada dasarnya masyarakat yang paling miskin sangat bergantung pada alam.

1. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari adanya pengembangan pariwisata di Pulau Merah adalah meningkatnya pendapatan. Baik pendapatan untuk daerah, KBM, maupun pendapatan bagi masyarakat sendiri. Selain itu, dengan adanya wisata Pulau Merah yang dikelola secara kolaboratif oleh beberapa instansi dan masyarakat telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sama sekali

Pokmas Wisata Pulau Merah dalam merekrut karyawan mengutamakan warga sekitar yang dianggap sudah susah mencari pekerjaan di luar, seperti orang-orang tua. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Oxfam, organisasi pembangunan dunia yang memobilisasi kekuatan masyarakat dalam memerangi kemiskinan, pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yang mempunyai nilai-nilai yang sama dan mensinergikan kontribusi dari semua *stakeholders* termasuk kelompok yang terpinggirkan dalam mengatasi isu-isu pembangunan. Selain itu, pelibatan masyarakat sesuai dengan prinsip kunci pembangunan inklusif yaitu menurut Gupta et al (2015) yakni memberikan peluang kepada semua masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan tingkat perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan akses publik dan akses untuk mengelola sumber daya alam.

Pelaku usaha yang terdapat di Pulau Merah juga meningkat tinggi. Semua pelaku usaha yang terdiri dari pengusaha warung, PKL, jasa payung, *homestay*, dan lain-lain berasal dari masyarakat sekitar Pulau Merah.

Selain itu, semua informan mengakui adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan sejak pengelolaan wisata Pulau Merah dilakukan secara kolaboratif. Bahkan, menurut pihak Kecamatan Pesanggaran, adanya wisata Pulau Merah yang semakin maju seperti saat ini sangat mempengaruhi naiknya harga tanah di sekitar Pulau Merah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri-ciri pembangunan inklusif yang dikemukakan oleh Prasentayotoko et al. (2014), yakni pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya manfaat yang diperoleh dari adanya wisata Pulau Merah sudah merata. Baik untuk Pemda Kabupaten Banyuwangi, KBM, Kecamatan Pesanggaran, Desa Sumbergaung, dan masyarakat sekitar.

2. Partisipasi

Selain manfaat, partisipasi merupakan komponen pembangunan inklusif. Kolaborasi antar *stakeholders* di Pulau Merah melibatkan semua sektor. Hal ini sesuai dengan definisi pembangunan inklusif yang dikemukakan oleh Gupta et al. (2015) bahwa pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang meliputi partisipasi masyarakat marjinal, sektor pemerintahan, sektor politik, dan sektor ekonomi yang saling berkaitan dalam proses sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung sumber daya yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya partisipasi dalam pembangunan dapat membentuk sebuah *social circle* yang baru bagi masyarakat maupun pihak lain. Hal ini dikarenakan partisipasi memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat sehingga masyarakat memiliki relasi yang banyak. Hal tersebut sesuai dengan implikasi pembangunan inklusif dari persepektif relasional, yakni membahas kelompok miskin dan kelompok terpinggirkan serta hubungan yang mereka miliki dengan kelompok kaya dan kelompok yang berkuasa (Gupta et al, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengukur banyaknya partisipasi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja di Pulau Merah karena partisipasi pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Menurut hasil wawancara yang dijabarkan di atas, partisipasi masyarakat di Pulau Merah dibagi menjadi dua, yakni partisipasi sebagai karyawan atau pelaku usaha dan partisipasi sebagai anggota pengurus Pokmas Wisata Pulau Merah. Jumlah total masyarakat sekitar Pulau Merah yang berpartisipasi dalam perkembangan wisata Pulau Merah sebanyak 274 partisipan. Jumlah tersebut tidak termasuk pegawai yang diberdayakan oleh setiap pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan prinsip kunci pembangunan inklusif per se yang dikemukakan oleh Gupta et al, yakni masyarakat terlibat dalam pembangunan dari segala aspek termasuk ekonomi dan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Pulau Merah sudah baik, hal itu terlihat dari banyaknya partisipan yang terlibat dalam upaya perkembangan dan pembangunan wisata Pulau Merah.

3. Ekologi Wisata

Komponen ekologi pada awalnya muncul karena pembangunan pada umumnya hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kerusakan ekologi yang akan terjadi sehingga muncul *green economy* dan *green growth*. Namun, konsep-konsep tersebut mengabaikan komponen sosial dalam pembangunan berkelanjutan (Gupta et al., 2015). Kemudian pembangunan inklusif muncul menyempurnakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan memasukkan komponen sosial dan ekologi.

Komponen ekologi dalam pembangunan dapat memastikan hak-hak, tanggung jawab, dan risiko yang terkait dengan batas ekosentris dibagi secara adil untuk masyarakat dan negara maupun untuk masa sekarang dan masa depan (Gupta et al, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis ada tidaknya komponen ekologi dalam pencapaian pembangunan inklusif di Pulau Merah melalui upaya-upaya yang telah dilakukan setiap *stakeholders* untuk menjaga ekologi di Pulau Merah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar Pulau Merah berkaitan dengan ekowisata (ecotourism) yang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Hal ini sesuai dengan kondisi pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene menurut Gupta et al. (2015) yaitu bekerjasama dengan lembaga atau korporasi yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis ekologi.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak KBM adalah membuat kebijakan terkait pembangunan warung yang harus menggunakan bahan alami yang bisa didaur ulang (tidak permanen). Selain itu, Pokmas Wisata Pulau Merah dan KBM Perum Perhutani mengajak masyarakat sekitar untuk menanam pohon pandan pantai dan pohon waru. Pokmas Wisata Pulau Merah juga pernah mengadakan perawatan terumbu karang yang berada di Pulau Merah. Hal ini sesuai dengan kondisi pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene yakni mengadopsi *multiple set* dalam batas ekosentris untuk mempertahankan kapasitas regeneratif bumi secara keseluruhan (Gupta et al., 2015).

Upaya Kecamatan Pesanggaran untuk menjaga kelestarian alam di Pulau Merah adalah dengan mengadakan kegiatan pembersihan pantai Pulau Merah secara rutin setiap hari Jum'at yang dinamakan sebagai Jum'at Bersih. Sementara itu, upaya Desa Sumberagung untuk menjaga ekologi wisata Pulau Merah adalah dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya tumbuhan dan terumbu karang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat komponen ekologi dalam pembangunan inklusif di Pulau Merah. Hal tersebut menunjukkan pembangunan inklusif di Pulau Merah sudah baik karena manfaat yang diperoleh dari adanya wisata Pulau Merah sudah merata dan pemberdayaan masyarakat tinggi.

Simpulan

Berikut ini akan disimpulkan pencapaian pembangunan inklusif pada pengembangan pariwisata di Pulau Merah melalui tiga komponen, sebagai berikut:

1. Dari komponen manfaat, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya wisata Pulau Merah dirasakan secara merata. Baik oleh pihak pemerintah, maupun oleh masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi di Pulau Merah mendapatkan peningkatan pendapatan, termasuk masyarakat sekitar Pulau Merah. Selain itu, dengan adanya wisata Pulau Merah dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Pulau Merah.
2. Dari komponen partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah, masyarakat yang terlibat dalam pengembangan dan pembangunan wisata Pulau Merah. Semua masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan di Pulau Merah berasal dari masyarakat sekitar Pulau Merah.
3. Dari komponen ekologi, dapat disimpulkan bahwa ekologi pada wisata Pulau Merah masih terjaga. Hal itu dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh semua *stakeholders* yang berkolaborasi dan masyarakat sekitar Pulau Merah.

Daftar Pustaka

- Amien, Mappadjantji. (2005). *Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”*. Jakarta: Gramedia.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan, 2000-2015. (Diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 20.43 WIB). <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1394>
- Badruddin, Syamsiah. (2009). *Pengertian Pembangunan: Teori dan Indikator Pembangunan*. (Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 01.11 WIB). <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan>
- Banyuwangi, Pemkab. (2015). Geliat Ekonomi di Pulau Merah. (Diakses pada tanggal 23 Juni 2016 pukul 22.47 WIB). <http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/geliat-ekonomi-di-pulau-merah.html>
- Cozzens, Susan E. dan Judith Sutz. (2012). *Innovation in Informal Settings. A Research Agenda*.
- Demartoto, Argyo. (2009). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Fitriani, Eva. (2015). Anggaran Promosi Kementerian Pariwisata Capai Rp 1 Triliun. (Diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 13.27 WIB). <http://www.beritasatu.com/nasional/246425-anggaran-promosi-kementerian-pariwisata-capai-rp-1-triliun.html>
- Gupta, Joyeeta et al. (2015). Toward and Elaborated Theory of Inclusive Development. *European Journal of Development Research*. Vol.27, No.4, halaman 541-559.
- Irawan, Mohammad Eri. (2015). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Diakses pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 22.40 WIB). <http://www.kbbi.co.id>
- Marketeers editor. (2015). Ranking Daya Saing Indonesia Meningkat Pesat. (Diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 12.56 WIB). <http://www.marketeers.com/ranking-daya-saing-indonesia-meningkat-pesat/>
- Perch, Leisa dan Gabriel Labbate. (2011). *Poverty in Focus*. International Policy Centre for Inclusive Grow, Poverty Practice, Bureau for Development Polici, UNDP. No. 23, halaman 1-35.
- Rauniyar, Ganesh dan Ravi Kanbur. (2010). Inclusive Growth and Inclusive Development: a review and synthesis of Asian Development Bank literatur. *Journal of the Asia Pacific Economy*. Vol. 15, No.4, halaman 455-469.
- Sachs, Ignacy. (2004). *Inclusive Development Strategy in Era of Globalization*. Geneva: International Labour Organization.
- Oxfam. *Inclusive Development: Ensuring Benefits for All*. (Diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 01.46 WIB). https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/inclusive_development.pdf

Widodo, Setyardi. (2015). Genjot Promosi, Anggaran Kemenpar 2016 ditambah Rp 5 Triliun. (Diakses pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 00.54 WIB). <http://www.industri.bisnis.com/read/20150709/12/451592/genjot-promosi-anggaran-kemenpar-2016-ditambah-rp5-triliun>

Wikipedia. (2016). Pantai Pulau Merah. (Diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 14.50 WIB). https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Pulau_Merah